

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI) IN GORONTALO THE NEW ORDER ERA

Wa Ode Mayang Rasti^{1*}, Joni Apriyanto², Helman Manay³

^{1,2,3}Department of History Education, Faculty of Social Sciences, University of Negeri
Gorontalo, Indonesia

rastimayang79@gmail.com^{1*}, apriyantojoni019@gmail.com², helman@ung.ac.id³

*Corresponding author

Manuscript received January 09, 2024; revised March 13, 2024; accepted May 15, 2024; Published July 30, 2024

ABSTRACT

The aim of this research is to understand the dynamics of the Indonesian Democratic Party (PDI) in general elections in Gorontalo. The method used is the historical research method, which follows four procedural steps: First, Heuristics, which involves the collection or investigation of historical sources. Second, Verification or Source Criticism, which tests the authenticity and accuracy of sources. Third, Interpretation or Analysis of the findings. Fourth, Historiography, which involves formulating the research results into a scholarly work with high-quality historical writing. The research findings reveal that the Indonesian Democratic Party (PDI) was established in Gorontalo in 1977 as a result of a party merger. During the New Order era, PDI faced significant limitations, as the government at the time leaned more towards Golkar. As a result, in five consecutive general elections during the New Order in Gorontalo, PDI never emerged as the winning party and consistently ranked third. Despite repeated losses in elections, the party, which carried the Marhaenist ideology, remained resilient. Various efforts were made to strengthen its support base, including direct engagement with the community. This culminated in 1997, following the Kudatuli incident, which led to the formation of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P). This event brought significant changes to PDI's party structure, and in the subsequent elections, PDI emerged as the winning party.

Keywords: PDI, new order, Gorontalo

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinamika Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam pemilihan umum di Gorontalo. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, yakni dengan empat langkah prosedur penelitian Sejarah: Pertama Heuristik yakni pengumpulan atau penelusuran sumber-sumber sejarah. Kedua menguji keaslian dan kebenaran sumber (Verifikasi/ Kritik Sumber). Ketiga Penafsiran atau Interpretasi. Keempat Historiografi yaitu perumusan hasil penelitian menjadi sebuah karya ilmiah dengan unsur-unsur kesejahteraan yang berkualitas dalam penulisan sejarah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terbentuk di Gorontalo pada tahun 1977 dari hasil Fusi Partai. PDI di era Orde Baru memiliki ruang gerak yang sulit karena pemerintahan saat itu lebih condong ke Golkar, sehingga dalam lima periode pemilu Orde Baru di Gorontalo, PDI tidak pernah muncul sebagai partai pemenang, melainkan selalu menempati posisi ketiga. Meskipun selalu kalah dalam pemilu tidak membuat semangat dari partai yang berjargon Marhaen ini padam, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan basis salah satunya dengan turun langsung melakukan pendekatan di masyarakat, puncaknya pada tahun 1997 setelah terjadinya peristiwa Kudatuli yang melahirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan membuat terjadi banyak perubahan dalam struktur kepartaian PDI dan pemilu selanjutnya PDI menjadi pemenang pemilu.

Kata kunci: PDI, orde baru, Gorontalo

INTRODUCTION

Bangsa Indonesia, sesungguhnya telah akrab dengan kehidupan partai-partai politik. Sebelum Republik Indonesia berdiri partai politik telah berfungsi dan berperanan tampil sebagai wadah perjuangan yang menggelorakan semangat nasionalisme. Pasang surut peran partai politik di pengaruhi oleh berbagai faktor: perubahan kebijakan pemerintah, dinamika internal partai, serta perubahan sosial ekonomi di masyarakat. Sejak peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965 Indonesia sering mengalami pergolakan. Pada awal pemerintahan orde baru mulai melakukan fundamental terkait dengan menata kembali hal penting yang menjadi faktor utama terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Dibiidang politik mulai ada perbaikan dan perubahan politik yaitu pada masa Soeharto hanya terdapat tiga partai politik. Adapun sistem 3 partai adalah salah satu kebijakan politik oleh Presiden Soeharto yang berlangsung sejak tahun 1973 1998. Sistem 3 partai itu dinamakan penyederhanaan serta penggabungan atau fusi dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas politik orde baru pada waktu itu. Pada tahun 1973 terjadi peleburan partai politik atau fusi. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 pemerintah menyederhanakan jumlah partai dengan kebijakan fusi partai. Empat partai politik Islam yaitu NU, Parmusi, Partai Sarekat Islam, dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lainnya yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia, Sehingga pada tahun 1977 hanya ada tiga organisasi politik yaitu PPP, PDI, dan GOLKAR (Kadir, 2014).

Gorontalo era Soeharto masih menjadi bagian dari Sulawesi Utara. PDI yang saat itu ikut tampil sebagai kontestan pemilu, belum berhasil menampakkan diri karna masih di bungkam oleh posisi Golkar yang sangat dominan. Pemungutan suara dilaksanakan 2 Mei. Cara pembagian kursi dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Pada pemilu kali ini terjadi peleburan/fusi partai politik. Setelah era Orde Baru, pergolakan politik di Gorontalo terus berlanjut dengan munculnya dinamika baru dalam partai politik, termasuk perubahan dalam kekuasaan politik lokal, perubahan dalam arah ideologi partai politik, serta perubahan dalam komposisi anggota DPRD Gorontalo. Faktor-faktor seperti pemilihan umum, perubahan kebijakan politik, dan pergeseran opini publik juga berkontribusi pada pergolakan politik di tingkat lokal. Pergolakan politik di Gorontalo masih terus berlangsung. Dengan dinamika yang terjadi di tingkat nasional maupun lokal, termasuk perubahan dalam struktur partai politik dan perubahan kebijakan politik, Gorontalo terus mengalami transformasi politik yang berdampak pada dinamika dalam DPRD dan politik lokal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pergolakan politik di Gorontalo dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari evolusi politik di Indonesia secara keseluruhan (Madjowa, 2015).

Gorontalo dalam konteks politiknya mengalami dinamika yang cukup menarik. Sebagai bagian dari Indonesia, Gorontalo ikut terlibat dalam proses politik nasional, seperti pemilihan umum, pembentukan kebijakan, dan implementasi program-program pemerintah pusat. Selain itu, sebagai provinsi yang relatif muda, Gorontalo juga mengalami perkembangan politik internal yang beragam. Pergantian kepemimpinan daerah, dinamika

antar partai politik lokal, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik merupakan contoh dari aspek-aspek yang mempengaruhi kondisi politik Gorontalo. Selaras dengan arus nasional, isu-isu seperti pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan lingkungan juga menjadi fokus dalam politik Gorontalo. Upaya untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang demi kemajuan provinsi menjadi agenda utama para pemangku kepentingan politik di Gorontalo. Dalam panorama politik, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, tidak hanya terjadi penetrasi kekuatan partai politik ke dalam struktur pemerintahan, tetapi juga upaya penyeragaman ideologi menjadi hal yang krusial. Hal ini tercermin dari munculnya tiga partai utama, yakni Golkar, PDI, dan PPP, sebagai langkah awal dari kebijakan tersebut. Namun, lebih dari sekadar pengisapan kekuatan partai, upaya penyeragaman ideologi dengan menggunakan Pancasila menjadi pilihan utama bagi Presiden Suharto dan elit Orde Baru. Gagasan tersebut tidak hanya terbatas pada partai politik, tetapi juga meluas ke organisasi sosial, budaya, dan keagamaan, bahkan mencakup lingkup pelajar dan mahasiswa (Yuliawati, 2021).

PDI merupakan kajian yang menarik untuk dipelajari karena merupakan salah satu partai politik yang pernah eksis di era Orde Baru bahkan sampai sekarang. Penelitian ini memakai beberapa sumber agar tema penulisannya semakin jelas, diantaranya: Pertama dalam jurnal yang berjudul “Dinamika Partai Politik Di Indonesia” yang di tulis oleh A Gau Kadir. Relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai bahan rujukan untuk melihat bagaimana kedudukan Partai politik Orde baru dalam menunjukkan eksistensinya, khususnya PDI (Kadir, 2014). Kedua dalam buku yang berjudul “Pemilu Gorontalo 1955-2014” yang ditulis oleh Verrianto Madjowa. Buku ini memiliki relevansi dengan judul penelitian karena sama-sama membahas bagaimana Pemilu Orde Baru yang dalam prosesnya memiliki perjalanan cukup panjang. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan salah satu partai yang menampakan kaki dalam pemilu Kabupaten Gorontalo dengan tujuan untuk menang dalam pemilu sejak awal kemunculannya, dengan berbagai program yang dijalankan untuk mendapat hati rakyat, ternyata untuk Kabupaten Gorontalo suara PDI tidak pernah berada di atas lawan politiknya. Peneliti juga membuat rumusan masalah yaitu bagaimana dinamika Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Gorontalo dalam Pemilu Orde Baru. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana Dinamika Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam pemilihan umum di Gorontalo tepatnya tahun 1977-1997 (Madjowa, 2015).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik dan memfokuskan penelitian ini dengan melihat dinamika Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam Pemilu di Gorontalo, mengingat pada masa Orde Baru dalam perjalanan politiknya ada tiga figur partai yang ikut andil bersaing untuk mendapatkan kursi pemerintahan, oleh karena itu peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Partai demokrasi Indonesia (PDI) di Gorontalo.

METHOD

Sebelum membahas lebih lanjut tentang 4 tahap dalam penelitian sejarah, alasan utama memilih objek mengenai PDI Di Kabupaten Gorontalo, dikarenakan peneliti ingin mengetahui mengapa era Soeharto dilakukan penyederhanaan Parpol dengan PDI sebagai

salah satu kontestan hasil peleburan fusi yang dalam pemilu tidak pernah berhasil menjadi pemenang. Studi ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan teknik *pertama* pengumpulan data heuristik (pengumpulan sumber). Pengumpulan sumber merupakan tahapan awal dalam pengadaan data yang dibutuhkan untuk penyusunan, adapun tehnik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti yaitu tehnik observasi lapangan, wawancara informan, pengumpulan arsip dokumen, dan studi pustaka. Dalam penjelasan langkah-langkah penelitian ini dapat dilihat dari studi penelitian sejarah peneliti mengenai "Partai Demokrasi Indonesia Dalam Pemilu 1977-1997". Langkah awal penelitian melakukan proses Heuristik dengan mencari dokumen-dokumen tertulis terkait partai politik Orde Baru, khususnya tentang PDI, baik berupa jurnal, buku dan arsip yang sesuai dengan tema. Dan untuk memperkuat bukti-bukti tertulis yang terdapat dalam dokumen, Peneliti juga melakukan wawancara untuk mengetahui lebih mendalam tentang judul. *Kedua* kritik sumber (verifikasi sumber) yang dalam cakupannya yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat mengkritik mana saja sumber-sumber yang dapat diambil dan tidak, maka dari itu peneliti harus benar-benar memverifikasi sumber yang dapat dipakai dalam penulisan. *Ketiga* interpretasi (penafsiran), interpretasi merupakan tahapan selanjutnya setelah kritik sumber. Interpretasi digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan sudah siap untuk disusun menjadi tulisan. *Keempat* adalah historiografi (penulisan sejarah). Tahapan terakhir ini merupakan tahapan yang perlu diperhatikan, penulisan yang sebelumnya masih merupakan data mentah sudah dijadikan karya tulisan sejarah yang mudah dipahami oleh pembaca.

RESULTS AND DISCUSSION

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam Politik Orde Baru

Proses demokratisasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberadaan partai politik. Partai politik merupakan komponen suprastruktur esensial dalam sistem pemerintahan yang harus ada untuk dikatakan sebagai sistem yang demokratis. Partai politik mempermudah sistem demokrasi dengan menyediakan pemimpin yang kompeten dan berintegritas melalui pemilu. Salah satu partai yang kini memiliki dampak terbesar dalam struktur pemerintahan di Indonesia adalah Partai Demokrasi Indonesia. PDI terbentuk melalui fusi lima partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba. Dalam prosesnya dari partai yang tidak pernah menang pemilu setelah terjadinya salah satu peristiwa besar (Kudatuli) melahirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang setelah Orde Baru selalu menjadi langganan partai pemenang pemilu, tentu hal ini tidak luput dari yang namanya jatuh bangun karena partai besar lahir dari partai kecil yang mau berjuang.

Masa Orde Lama menorehkan sejumlah persoalan yang justru berkebalikan dari apa yang dihadapi oleh masa demokrasi liberal. Kekuasaan Presiden sangat luas dan menonjol, segala kewenangan yang semula dijalankan oleh DPR menjadi kewenangan

presiden. Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai dengan jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1966 dan berakhir dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Periode ini ditandai dengan dominasi militer dalam politik, penekanan pada stabilitas nasional, dan pembangunan ekonomi yang pesat. Pada pertengahan 1960-an, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi yang serius. Konflik ideologis antara kekuatan komunis, nasionalis, dan militer memuncak dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), yang menyebabkan terbunuhnya sejumlah jenderal militer. Kudeta yang gagal ini dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI), memicu penumpasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Situasi ini membuka jalan bagi Jenderal Soeharto untuk mengambil alih kendali dengan dukungan militer. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, Soeharto memperoleh wewenang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Soeharto kemudian memanfaatkan Supersemar untuk menyingkirkan pengaruh Soekarno dan PKI dari panggung politik, serta mengonsolidasikan kekuasaannya (Budiardjo, 2003).

Pasang-surut jumlah partai politik kembali terjadi pada rezim Soeharto dan setelah berakhirnya Orde Baru. Pemilihan umum pertama masa Orde Baru tahun 1971 dirancang untuk mencapai tujuan ganda: memformalkan sistem politik pada setiap tingkat didominasi oleh birokrasi, dengan Presiden Soeharto dan Angkatan Bersenjata memegang kendali kekuasaan tetapi berbagi dengan pejabat sipil. Pasca pemilu 1971 muncul kembali ide-ide penyederhanaan partai yang dilandasi penilaian hal tersebut dilakukan karena partai politik selalu menjadi sumber yang mengganggu stabilitas, gagasan ini menimbulkan sikap Pro dan Kontra karena dianggap membatasi atau mengekang aspirasi politik dan membentuk partai-partai hanya kedalam golongan nasional, spiritual dan karya. Pada tahun 1973 konsep penyederhanaan partai (Konsep Fusi) sudah dapat diterima oleh partai-partai yang ada dan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan, sistem fusi ini berlangsung hingga lima kali Pemilu selama pemerintahan Orde Baru yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 (Aulia, 2016).

Pada masa Orde Baru, pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang sangat terpusat, mengurangi otonomi daerah dalam pengambilan keputusan. Hal ini berpengaruh besar pada Gorontalo, di mana berbagai program pembangunan diluncurkan untuk meningkatkan infrastruktur, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Pertanian dan perkebunan dikembangkan dengan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, ditingkatkan untuk memperbaiki konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selama pemerintahan Orde Baru yang berlangsung lama, banyak program dan janji yang dicanangkan untuk masyarakat. Meskipun tidak seburuk masa penjajahan, banyak warga yang mengeluh. Pada masa ini, berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, perkebunan, seni budaya, dan infrastruktur mengalami perkembangan pesat. Setiap negara memiliki ciri khas dalam pelaksanaan demokrasinya, yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan tujuan nasional. Demokrasi Indonesia, atau demokrasi

Pancasila, menekankan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, dengan mahasiswa memainkan peran penting dalam proses demokrasi. Pemerintah mengutamakan lima prioritas dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Orde Baru berdiri atas dasar keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang ditujukan kepada Soeharto, untuk mengambil langkah demi memulihkan stabilitas pemerintahan, sebagaimana diatur dalam ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menitikberatkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten, serta menekankan stabilitas pemerintahan dan pembangunan. Soeharto, sebagai Presiden kedua Republik Indonesia pada masa Orde Baru, dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Meskipun konstitusi mengamanatkan pergantian presiden setiap lima tahun, pada masa Orde Baru, Soeharto berhasil mempertahankan kekuasaannya tanpa adanya pergantian yang signifikan. Pengaruh dominan partainya, Golkar, di DPR memungkinkan penetapan Soeharto sebagai presiden selama 32 tahun, menjadikannya de facto presiden seumur hidup dengan enam kali masa jabatan. Ini karena Golkar, yang menjadi partai penguasa di DPR, dipimpin oleh Soeharto sendiri (Yuliatwati, 2021).

Soeharto melaksanakan program-program untuk masyarakat, termasuk di antaranya program transmigrasi yang masih dirasakan dampaknya hingga saat ini oleh masyarakat Gorontalo. Melalui pembangunan transmigrasi tersebut, Soeharto berhasil membangun dengan sangat efektif, sehingga pemerataan penduduk di Indonesia, khususnya di daerah Gorontalo yang terdampak, sudah mulai merata berkat kebijakannya. Masyarakat Gorontalo melihat Soeharto sebagai seorang presiden yang mampu membangun Indonesia setelah mengalami berbagai masalah. Bagi sebagian besar orang Gorontalo, Soeharto dianggap sebagai sosok yang baik. Namun, tentu ada yang tidak suka dengan sosok beliau. Pada masa Orde Baru, perjuangan politik sangatlah sulit, terutama bagi kader PDI di Gorontalo. Sebab, di Gorontalo basis terbesar adalah Partai Golkar. Pada tahun 1997, PDI mulai menampakkan diri sebagai PDI Perjuangan, berusaha menegaskan eksistensinya di Gorontalo dan di seluruh Indonesia. Namun, di bawah rezim Suharto, PDI mengalami tekanan berat. Pemerintah Orde Baru sangat ketat dalam mengontrol aktivitas politik, dan PDI termasuk salah satu yang paling ditekan. Demokrasi saat itu sangat terbatas, membuat partai-partai oposisi sulit bergerak. Pada tahun 1997, terjadi peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli), sebuah insiden besar yang menunjukkan besarnya represi yang dihadapi oleh PDI. Peristiwa ini menandai titik balik penting sebelum lengsernya Suharto. PDI mengalami perpecahan internal dan tekanan eksternal, yang semakin menyulitkan perjuangan politik mereka. Selama masa Orde Baru, kebebasan politik sangat dibatasi. PDI, bersama dengan partai lain seperti PPP, harus beroperasi dalam kondisi yang sangat terkendali, dengan sedikit ruang untuk menyuarakan aspirasi rakyat atau menjalankan kampanye politik yang bebas (Mohamad et al., 2023).

Dinamika Berdirinya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Gorontalo

Pada tanggal 9 Maret 1970, kelima partai ini membentuk sebuah koalisi yang disebut Kelompok Demokrasi Pembangunan. Kelompok ini kemudian dikukuhkan melalui pernyataan bersama pada tanggal 28 Oktober 1971. Koalisi ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan politik dalam rangka menghadapi tantangan politik yang ada di Indonesia saat itu. Pada tanggal 10 Januari 1973, Kelompok Demokrasi Pembangunan mengambil langkah strategis dengan memfusi diri menjadi satu partai politik baru, yang disebut Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pembentukan PDI ini bertujuan untuk menciptakan sebuah wadah perjuangan politik rakyat yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Secara umum, PNI, PDI, dan PDI Perjuangan semuanya menegaskan bahwa Pancasila adalah asas partai mereka. Ketiga partai ini memiliki rantai sejarah yang tak terputus. PDI Perjuangan memiliki kesinambungan historis dengan PDI, khususnya PDI di bawah pimpinan Megawati pada akhir Orde Baru, dan PDI sendiri merupakan hasil fusi dari lima partai, termasuk PNI, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. PDI Perjuangan menegaskan kembali bahwa Pancasila 1 Juni 1945 adalah ideologi final partai pada Kongres III di Denpasar, Bali, pada 6-9 April 2000.

PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) merupakan salah satu kekuatan politik terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Sejak berdirinya, partai ini telah memainkan peran penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, terutama setelah era reformasi. PDI Perjuangan dibentuk pada tahun 1999 sebagai penerus dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dengan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh sentral yang membawa warisan ideologis dari ayahnya, Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dengan basis massa yang kuat dan strategi politik yang efektif, PDI Perjuangan berhasil memenangkan beberapa pemilihan umum dan menguasai posisi kunci dalam pemerintahan. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan partai dalam mobilisasi dukungan rakyat, tetapi juga menegaskan dominasi mereka dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia. Dominasi PDI Perjuangan dalam pemerintahan saat ini ditandai oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang juga berasal dari partai ini, serta kehadiran banyak kader partai di berbagai jabatan strategis pemerintahan. Keberadaan dan peran signifikan PDI Perjuangan dalam pemerintahan mencerminkan kekuatan partai ini dalam mempengaruhi arah kebijakan negara. Namun, dominasi tersebut juga disertai dengan berbagai tantangan dan kritik, baik dari lawan politik maupun masyarakat umum. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana PDI Perjuangan mengelola kekuatannya, merespons kritik, dan menghadapi tantangan di tengah dinamika politik yang terus berkembang di Indonesia (Thaha, 2016).

Pada tahun 1973, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dibentuk melalui penggabungan beberapa partai, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Pengelompokan partai-partai ini dilakukan sebagai usaha untuk membina stabilitas politik, yang berhasil dicapai melalui proses fusi partai-partai politik tersebut. PDI pada masa itu, yang kemudian menjadi PDI Perjuangan (PDIP), sebenarnya adalah partai dengan campuran ideologi yang kompleks. Di antara unsur-

unsur yang bergabung dalam fusi tersebut, terdapat sikap saling curiga. PNI meragukan loyalitas Parkindo dan Partai Katolik kepada bangsa ini, menganggap mereka sebagai agen imperialisme dan kapitalisme. Sebaliknya, Parkindo dan Partai Katolik mencurigai PNI memiliki keterkaitan dengan PNI Asu pada masa Orde Lama dan hanya menekankan Marhaenisme, sehingga dianggap tidak pancasilais. Murba dicurigai sebagai penerus ideologi Trotsky. Tidak mengherankan, Parkindo dan Partai Katolik sempat mempertimbangkan untuk bergabung membentuk Partai Kristen Demokrat, meskipun rencana ini akhirnya tidak terwujud (Multikul, 2013).

Awal mula PDI di Gorontalo pada masa Soeharto terletak di Tuladengi, Telaga Biru dalam bentuk rumah kecil yang dikontrak. PDI pada masa itu kondisinya memang agak sulit untuk berkembang karena PDI dianggap pemberontak dan Komunis, sehingga siapapun yang kedapatan mengikuti partai ini akan dianggap pembangkang terhadap pemerintah dan dipersulit aksesnya dalam mengurus sesuatu di tingkat daerahnya. Sampai sekarang pun PDI masih dianggap sebagai Komunis tapi itu sudah terbantahkan oleh Perpres. Di Kabupaten Gorontalo sendiri, cara yang digunakan untuk meningkatkan basis PDI saat itu dengan mengutus Kader-Kader yang sudah dipercayai untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat secara personal, karena untuk melakukan sosialisasi atau pertemuan secara masal sangat sulit akibat keterbatasan ruang yang dimiliki Partai PDI. Pada masa Orde Baru, sistem politik Indonesia sangat terpusat dan terkendali. Rezim Suharto menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk melalui partai politik yang mendukung pemerintah, yakni Golkar. Di Gorontalo, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, Golkar memiliki basis yang sangat kuat. Dominasi Golkar ini membuat perjuangan politik bagi partai-partai lain, terutama Partai Demokrasi Indonesia (PDI), menjadi sangat sulit. Kader-kader PDI di Gorontalo menghadapi tantangan yang besar dalam memperjuangkan aspirasi politik mereka di bawah tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak yang berkuasa (Fahrudin Faris. Wawancara 28 Mei 2024).

Pemerintah Orde Baru berupaya keras menghalangi keturunan Sukarno, khususnya Megawati, dari memimpin PDI karena dianggap mengancam kekuasaan mereka. Konflik berkepanjangan terjadi sejak 1993 hingga 1999, yang mengakibatkan perpecahan dalam PDI. Satu pihak dipimpin oleh Megawati yang didukung oleh basis akar rumput, sedangkan pihak lain dipimpin oleh Suryadi yang didukung oleh Orde Baru. Legitimasi kedua kubu PDI diuji dalam pemilu 1997. Pada pemilu tersebut, PDI kubu Suryadi menjadi peserta pemilu bersama PPP dan Golkar, sementara PDI di bawah Megawati memboikot pemilu dan memilih Golput atau menjalin aliansi strategis dengan PPP dalam koalisi yang dikenal sebagai 'Mega-Bintang'. Perolehan suara PDI turun drastis dari 14,89 persen pada tahun 1992 menjadi 3,06 persen pada tahun 1997. Penurunan tajam ini menjadi bukti legitimasi kepemimpinan PDI di bawah Megawati. Setelah Orde Baru tumbang, dualisme kepemimpinan PDI terus berlangsung sampai pada Megawati mendeklarasikan perubahan nama PDI yang dipimpinnya menjadi PDI Perjuangan, 14 Februari 1999. Hasil Pemilu 1999 kemudian menjadi bukti untuk kedua kalinya kepemimpinan PDI yang sesungguhnya. Legitimasi rakyat terhadap

kepemimpinan PDI ternyata diberikan kepada PDI dibawah Megawati yang telah berubah nama menjadi PDI Perjuangan.

Pada tahun 1997, di tengah tekanan politik yang semakin meningkat, PDI mulai menampakkan diri sebagai PDI Perjuangan. Transformasi ini merupakan upaya untuk menegaskan eksistensi dan identitas partai di seluruh Indonesia, termasuk di Gorontalo. PDI Perjuangan diharapkan mampu menggalang kekuatan baru dan mendapatkan dukungan lebih luas dari masyarakat yang menginginkan perubahan. Perubahan nama dan identitas ini juga merupakan strategi untuk membedakan PDI dari partai-partai lain serta untuk menyatukan semangat perjuangan di antara kader-kadernya. Di Gorontalo, upaya PDI Perjuangan untuk memperkuat posisinya menghadapi tantangan besar karena Golkar telah lama mengakar dan memiliki dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Meskipun menghadapi tekanan berat, PDI Perjuangan terus berusaha menegaskan eksistensinya di Gorontalo. Berbagai strategi dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, termasuk dengan memperkuat basis di tingkat akar rumput, meningkatkan komunikasi dengan konstituen, dan mengadakan berbagai kegiatan yang menarik simpati publik. Selain itu, PDI Perjuangan juga berusaha memperjuangkan isu-isu lokal yang relevan bagi masyarakat Gorontalo, seperti masalah ekonomi, pertanian, dan kesejahteraan sosial. Dengan fokus pada isu-isu ini, PDI Perjuangan berharap dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat yang menginginkan perubahan dan perbaikan kondisi hidup mereka (Madjowa, 2015).

Ketika melihat konteks politik di Gorontalo pada tahun 1997, terutama bagi kader PDI (Partai Demokrasi Indonesia), terdapat beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan diantaranya Pada tahun 1997, Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan ini dikenal karena otoritarianisme dan keterbatasan demokrasi, di mana partai politik oposisi seperti PDI sering mengalami tekanan dan represi. Kader-kader PDI di Gorontalo menghadapi tantangan yang sejalan dengan kader-kader PDI di wilayah lain di Indonesia. Mereka dihadapkan pada tekanan dan kendala yang serupa dalam menjalankan aktivitas politik dan memperjuangkan aspirasi politik partai mereka. Lingkungan politik di Gorontalo, seperti di banyak daerah lain di Indonesia pada masa itu, terbatas dan berisiko bagi partai oposisi seperti PDI. Kader-kader PDI harus beroperasi dalam kerangka yang didominasi oleh pemerintahan otoriter Orde Baru yang mengontrol secara ketat aktivitas politik. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang besar, kader-kader PDI di Gorontalo tetap berjuang untuk memperjuangkan aspirasi politik partai mereka. Mereka aktif dalam melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, meskipun dalam lingkungan yang sulit dan berisiko (Hans Tumulo. Wawancara 5 Maret 2024).

Setelah Orde Baru tumbang, dualisme kepemimpinan PDI terus berlangsung sampai pada Megawati mendeklarasikan perubahan nama PDI yang dipimpinnya menjadi PDI Perjuangan, 14 Februari 1999. Hasil Pemilu 1999 kemudian menjadi bukti untuk kedua kalinya kepemimpinan PDI yang sesungguhnya. Legitimasi rakyat terhadap kepemimpinan PDI ternyata diberikan kepada PDI dibawah Megawati yang telah berubah

nama menjadi PDI Perjuangan. Di tengah pluralitas partai politik yang ikut pemilu 1999, PDIP tidak hanya mengalahkan PDI Orde Baru tetapi juga mampu keluar sebagai pemenang pemilu. Hasil pemilunya sangat prestisius, yaitu 33,7 persen. Diduga, pencapaian yang diraih oleh PDIP dalam pemilu itu tidak akan mampu diulang dalam sejarah pemilu-pemilu berikutnya, bahkan oleh partai-partai yang lain. Sedangkan PDI bentukan Orde Baru, yang saat itu dibawah Budi Hardjono, menjadi partai desimal, yaitu perolehan suaranya tidak mencapai 1 persen. Dengan demikian resistensi pendukung PDI dibawah kepemimpinan Megawati telah melahirkan PDI Perjuangan. PDI, atau PDI Perjuangan, masih merupakan salah satu partai politik terkemuka di Indonesia. Sejak reformasi, PDI Perjuangan telah menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan kemudian Joko Widodo (Jokowi), partai ini memainkan peran penting dalam pemerintahan dan politik nasional. PDI Perjuangan memiliki basis massa yang kuat, terutama di kalangan rakyat pedesaan dan kelas pekerja. Partai ini memiliki visi untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dalam arena politik, partai ini memiliki jumlah kursi yang signifikan di parlemen dan telah mengisi berbagai posisi penting di tingkat nasional maupun daerah. Dalam pemerintahan, PDI Perjuangan telah berperan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan infrastruktur di Indonesia. Mereka juga menjadi kekuatan utama dalam koalisi pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Secara keseluruhan, PDI Perjuangan tetap menjadi kekuatan politik yang signifikan di Indonesia dan terus berperan dalam pembangunan negara serta menanggapi berbagai tantangan politik dan sosial yang dihadapi oleh bangsa ini (Aulia, 2016).

Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mampu berkuasa selama 32 tahun di Republik Indonesia. Melalui proses yang cukup panjang, pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional pasca peristiwa 1965. Seperti halnya yang ditegaskan oleh Ali Moertopo, bahwa stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan syarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Pada periode atau kurun waktu 1966-1980 bisa dikatakan sebagai tahapan dari era konsolidasi Orde Baru dan Soeharto. Sebagai upaya untuk menggantikan posisi Soekarno, kemunculan dari Jendral Soeharto yang bahkan sebelumnya tidak dikenal, menjadi aktor yang cukup berperan dalam perubahan tatanan politik pasca peristiwa 65. Namun pada awalnya perubahan yang dilakukan oleh Jendral Soeharto tidaklah cukup radikal. Masa Orde Baru, yang berlangsung dari 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, merupakan periode di mana partai politik di Indonesia mengalami pengekanan yang signifikan. Pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dengan mengontrol dan memanipulasi partai politik, mengarah pada pembentukan sistem politik yang sangat terkendali dan terpusat.

PDI Perjuangan (PDIP) lahir dari perjuangan untuk bertahan dan melawan dominasi negara terhadap kehidupan partai pada masa menjelang runtuhnya Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berupaya keras menghalangi keturunan Sukarno, khususnya Megawati, dari memimpin PDI karena dianggap mengancam kekuasaan mereka. Konflik

berkepanjangan terjadi sejak 1993 hingga 1999, yang mengakibatkan perpecahan dalam PDI. Satu pihak dipimpin oleh Megawati yang didukung oleh basis akar rumput, sedangkan pihak lain dipimpin oleh Suryadi yang didukung oleh Orde Baru. Legitimasi kedua kubu PDI diuji dalam pemilu 1997. Pada pemilu tersebut, PDI kubu Suryadi menjadi peserta pemilu bersama PPP dan Golkar, sementara PDI di bawah Megawati memboikot pemilu dan memilih Golput atau menjalin aliansi strategis dengan PPP dalam koalisi yang dikenal sebagai 'Mega-Bintang'. Perolehan suara PDI turun drastis dari 14,89 persen pada tahun 1992 menjadi 3,06 persen pada tahun 1997. Penurunan tajam ini menjadi bukti legitimasi kepemimpinan PDI di bawah Megawati (Hidayat, 1998).

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Di Gorontalo Era Orde Baru kesimpulan yang dapat di ambil yaitu: pada masa Orde Baru PDI bukanlah partai dominan bahkan bisa dibilang tidak pernah menang pemilu, namun usaha dan perjuangan tidak berhenti dilakukan oleh kader partai untuk meningkatkan eksistensi di masyarakat. Pada masa ini kontestasi politik terjadi antara partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PDI dengan Golkar sebagai partai dominan yang memiliki basis terbesar di Gorontalo hal ini juga disebabkan karena dukungan yang kuat terhadap Golkar di wilayah ini ditambah didukung oleh kebijakan pemerintah Orde Baru yang sangat mendukung Golkar dan menekan partai-partai oposisi. Di bawah rezim Soeharto yang memimpin selama 32 tahun lamanya PDI mengalami tekanan berat, yang membuat semakin melemahnya pengaruh partai di masyarakat. Selama masa Orde Baru kebebasan politik sangat dibatasi, PDI bersama dengan partai lain harus beroperasi dalam kondisi yang sangat terkendali, dengan sedikit ruang untuk menyuarakan aspirasi rakyat atau menjalankan kampanye politik yang bebas. Berbagai usaha terus dilakukan untuk menarik masa mulai dari menunjuk tim sukses di berbagai wilayah dan melakukan program-program yang sesuai dengan kondisi di masyarakat.

Setelah melewati pasang surut jatuh bangun dalam membangun partai puncaknya pada peristiwa kudatuli (27 Juli 1996) dimana terjadinya masalah internal PDI berupa dualisme kepemimpinan Soejardi vs Megawati sebuah insiden besar yang menunjukkan besarnya represi yang dihadapi oleh PDI. Peristiwa ini menandai titik balik penting sebelum lengsernya Soeharto. PDI yang mengalami perpecahan internal dan tekanan eksternal semakin menyulitkan perjuangan politik mereka. PDI memulai transformasinya menjadi PDI Perjuangan dalam upaya menegaskan eksistensinya di Gorontalo dan di seluruh Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk menyatukan semangat perjuangan dan memperkuat identitas partai di tengah tekanan politik. Meskipun menghadapi banyak tantangan, PDI Perjuangan terus berusaha menegaskan keberadaannya melalui penguatan basis di tingkat akar rumput, komunikasi yang intensif dengan konstituen, dan fokus pada isu-isu lokal yang relevan bagi masyarakat Gorontalo.

REFERENCES

- Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115–126. <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.362>
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama.
- Hidayat, A. (1998). *Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998) Oleh: Arief Hidayat*. 155–164. <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9090>
- Kadir, A. G. (2014). Dinamika Partai Politik Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 16(2), 132. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724>
- Madjowa, V. (2015). *Pemilu Gorontalo 1955-2014*.
- Mohamad, S., Wantu, A., & Malae, A. K. (2023). *Sosok Soeharto Di Mata Masyarakat Gorontalo Pendahuluan Metode Hasil dan Pembahasan*. 2(2), 391-398. <https://doi.org/10.31004/koloni.v2i2.355>
- Multikul, M. A. H. *Kebiasaan Sosial-Budaya dan Tradisi Keagamaan yang Memudar di Masyarakat Prambanan Pasca Orde Baru*, 30–47.
- Thaha, I. (2016). *PDI Perjuangan dan Islam (Kajian Atas Akomodasi Islam dalam Politik) Disertasi*. 1–23.
- Yuliawati, F. & suryo ediyono. (2021). *Kondisi Politik Orde Baru di Gorontalo Tahun 1968-1998*. 7(1), 61–67. <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v7i1.5844>
- Wawancara Bersama Bapak Hans Tumulo, Pada Tanggal 5 Maret 2024, Di Kec. Kota Tengah. Kota Gorontalo
- Wawancara Bersama Bapak Fahrudin Faris, Pada Tanggal 8 Mei 2024, Di Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo